

Setelah Ditandatangani Jokowi, Revisi Kedua UU ITE Resmi Berlaku

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Revisi UU ITE). Setelah ditandatangani Kepala Negara pada 2 Januari 2024, RUU ITE tersebut resmi berlaku.

Hal tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Bahwa untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif dan berkeadilan perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum

dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, teknologi informasi dan/atau transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum," bunyi pertimbangan UU tersebut dikutip, Kamis (4/1).

Pada UU tersebut, Pasal 27 ayat 3 tidak lagi berlaku. Namun ada penambahan pada Pasal 27 yakni Pasal 27 A dan Pasal 27 B.

Sebelumnya, Komisi I DPR menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Revisi UU ITE) disahkan menjadi UU.

Persetujuan itu telah diputuskan dalam forum pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi I DPR bersama pemerintah, Rabu (22/11) lalu. ● han

Prof Eddy Hiariej Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan di PN Jaksel

JAKARTA (IM) - Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Prof. Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, kembali mengajukan gugatan praperadilan melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, terkait penetapan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyanto menyatakan, pengajuan tersebut didaftarkan pada Rabu (3/1).

"Bahwa memang betul telah diajukan kembali permohonan praperadilan oleh pemohon mantan wamenkumham Prof. Dr. Omar Hiariej yang didaftarkan ke kepaniteraan pidana PN Jaksel pada hari Rabu 3 Januari 2024," kata Djuyanto, Kamis (4/1).

PN Jaksel telah menetapkan hakim tunggal untuk praperadilan tersebut. Sidang perdana dijadwalkan pada pekan depan.

"Telah ditetapkan hari sidang pertama yaitu pada 11 Januari 2024," ujarnya.

Sebelumnya, eks Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej dan dua orang dekatnya, Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi

mengajukan pencabutan permohonan Praperadilannya dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 20 Desember 2023.

"Betul ada pencabutan permohonan dr Pemohon, tapi Termohon mengajukan keberatan secara lisan, Hakim sarankan supaya tertulis, sidang diskors sampai isoma, kalau benar keberatan pihak Termohon, maka sidang dilanjutkan," ujar Humas PN Jakarta Selatan, Djuyanto.

Menurutnya, kubu eks Wamenkumham dan kawan-kawan (dkk) memang mengajukan pencabutan praperadilan dalam sidang gugatan praperadilan tersebut. Namun, belum dipastikan apakah sidang bakal dihentikan lantaran masih menantikan jawaban dari kubu KPK dahulu.

Pengacara Eddy Hiariej dkk, Iwan Priyatno menerangkan, pihaknya telah menyerahkan surat permohonan pencabutan Praperadilan pada hakim tunggal Estiono dan Biro Hukum KPK dalam persidangan kali ini. Namun, dia tak menjelaskan alasan Eddy Hiariej dkk mencabut permohonan Praperadilan tersebut. ● han

Kejagung Lelang 6 Tas Hermes, Harganya Kisaran Rp 60 Juta

JAKARTA (IM) - Pusat Pemulihan Asat Kejaksanaan Agung (Kejagung) melelang beberapa barang sita eksekusi berupa 6 tas merek Hermes milik istri terpidana kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (persero), Benny Tjokro.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, harga setiap tas berkisar Rp 60 juta.

"Nilai limit terhadap barang sita eksekusi yang akan dilelang yakni senilai kurang lebih Rp 60.000.000 untuk setiap tas bermerek Hermes tersebut," kata Ketut dalam keterangannya, Kamis (4/1).

Lelang enam tas mewah itu dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV dan diumumkan pada 24 Januari 2024. Lelang atas barang sitaan ini di-

harapkan dapat berdampak pada pulihnya perekonomian negara serta mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Pelaksanaan lelang akan dilakukan secara Open Bidding terhadap enam buah tas bermerek Hermes pada Rabu tanggal 24 Januari 2024," ujar Ketut.

Pemasaran enam barang sita eksekusi ini juga akan dilakukan dalam tiga kali tahapan yakni Tahap I pada Selasa (9/1), lalu Tahap II pada Selasa (16/1), dan Tahap III pada Senin (22/1).

"Pemenang lelang akan diumumkan pada Kamis (24/1) pukul 14.00 WIB dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV dan diumumkan pada 24 Januari 2024. Lelang atas barang sitaan ini di-

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



KAMPANYE ANIES BASWEDAN DI CIAMIS

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi politiknya pada kampanye gerak bersama jangkau semua di Gedung Islamic Center (IC) Kab. Ciamis, Jabar, Kamis (4/1). Dalam kampanye Anies, menggaungkan perubahan sebagai harapan bagi mereka yang merasakan kenyamanan tidak menginginkan perubahan.

Bagi-bagi Susu di CFD, Bawaslu Sebut Cawapres Gibran Langgar Aturan HBKB

Pelanggaran yang dilakukan Gibran soal bagi-bagi susu di CFD akan diteruskan ke Bawaslu DKI untuk disampaikan ke Pemprov DKI Jakarta.

JAKARTA (IM) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Pusat memutuskan bahwa kegiatan Gibran Rakabuming Raka membagikan susu di area car free day (CFD) sebagai pelanggaran aturan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey alias Sonny Pangkey menjelaskan, kegiatan calon wakil presiden nomor urut 2 itu melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor

12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan HBKB.

"Bawaslu Jakarta Pusat merekomendasikan temuan adanya kegiatan pembagian susu oleh Gibran Rakabuming Raka kepada warga yang berada di wilayah car free day Jakarta Pusat sebagai pelanggaran hukum lainnya," ujar Sonny dalam keterangan tertulis, Kamis (4/1).

Keputusan ini merupakan hasil kajian dalam rapat bersama Bawaslu Jakarta Pusat dan Bawaslu DKI pada Rabu (3/1) malam. Atas dasar itu,

temuan pelanggaran tersebut akan diteruskan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk disampaikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan ditindaklanjuti.

"Diteruskan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Sonny.

Sebagai informasi, Bawaslu Jakarta Pusat telah memeriksa Gibran pada Rabu (3/1) kemarin, terkait kegiatan bagi-bagi susu di CFD Jakarta.

Sebelumnya, Bawaslu Jakarta Pusat sudah memeriksa Ketua DPP PAN Zita Anjani, serta dua kadernya, yakni Sigit Purnomo alias Pasha dan

Surya Utama alias Uya Kuya. Mereka diketahui hadir dalam kegiatan Gibran bagi-bagi susu di area CFD Jakarta yang berlangsung pada 3 Desember 2023.

Kegiatan ini kemudian masuk daftar temuan pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat untuk selanjutnya diselidiki.

"Diduga terdapat unsur kegiatan untuk kepentingan partai politik dengan melibatkan calon anggota legislatif dan calon wakil presiden usungan partai politik," kata Sonny.

Sebelum diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat, Gibran sendiri telah membantah berkampanye di area CFD

Prabowo: Banyak yang Tuduh Saya Kudeta, Mungkin Muka Saya Muka Kudeta ...

JAKARTA (IM) - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mendatangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jakarta Pusat, untuk berdiskusi tentang banyak hal menjelang Hari Pers Nasional (HPN), Kamis (4/1).

Prabowo mengaku dirinya kerap dituding ingin melakukan kudeta, bahkan ketika masih aktif sebagai tentara sekali pun. Namun, Prabowo menegaskan kepercayaan terhadap demokrasi.

"Saya orang yang percaya dengan demokrasi. Saya kira saya sudah buktikan komitmen saya dengan demokrasi, ya kan? Saya dulu tentara, dulu banyak menuduh saya ini, itu, mau kudeta, ya kan. Tapi saya tidak kudeta. Berkali-kali. Enggak tahu, mungkin muka saya muka kudeta kali. Tapi tidak, saya percaya demokrasi," ujar Prabowo.

Lantas pensiunan TNI jenderal bintang tiga itu

memberikan bukti-bukti dirinya mengikuti proses demokrasi selama ini, di antaranya pernah mengikuti konvensi capres Partai Golkar, meski tidak terpilih. Kemudian Ketua Umum Partai Gerindra itu akhirnya mengikuti Pemilu 2009 setelah berdirinya Partai Gerindra.

"2009 sebagai calon wakil presiden Ibu Mega. Habis itu sebagai capres. Capres lagi, 2 kali kalah. Habis itu keempat kali, saya percaya dengan proses demokratis. Elemen dari demokrasi pertama adalah pemilihan umum. Rakyat harus bisa memilih pemimpin," tuturnya.

Lalu, Prabowo menyinggung soal kebebasan pers. Prabowo menyebutkan, kebebasan pers sebagai check and balances, yakni untuk mengendalikannya penguasa.

"Dan dengan kebebasan, dengan pers yang dinamis, dan pers kalau perlu keras, kadang sakit hati kita

baca. Tapi itu juga engendalikannya kita, itu memberi tahu kita *something wrong*. Ada masalah di negara kita," katanya.

"Sering dikatakan suatu negara yang persnya kuat, tidak ada kelaparan. Itu salah satu. Karena begitu ada kelaparan tek, tek, tek, tek semua tahu," ujarnya.

Sementara itu, Prabowo menyebut dirinya tidak mungkin bisa menjadi capres tanpa kehadiran pers yang bebas. Dia juga mengatakan Gerindra bisa berkembang karena kebebasan pers.

"Menurut saya pers adalah faktor demokrasi tersebut. Dan itu situasinya begitu. Maaf ya sekarang saya juga. Saya jelek-jelek ini kita punya koran juga. Walaupun oplahnya enggak banyak, kadang-kadang enggak banyak, kita bagi-bagi saja. Ada majalah, sekarang ada televisi," kata Prabowo dengan tegas. ● han

Anies Janjikan ke Petani Solok, Pupuk Terjangkau dan Tersedia

SOLOK (IM) - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, berjanji menuntaskan masalah kelangkaan pupuk untuk petani.

"Soal pupuk ini insya Allah akan kita ubah. Supaya bisa beli pupuk kapan saja, berapa saja sesuai dengan kebutuhan petaninya," kata Anies dalam keterangan tertulis saat menghadiri proses makan Bajamba di Solok, Sumatera Barat, Rabu (3/1).

Masalah kelangkaan pupuk tak seharusnya dilanjut dari masa ke masa. Terlebih lagi, ketersediaan pupuk ini menjadi keluhan petani paling awal, bukan hanya di Solok, melainkan juga di daerah lain di Indonesia.

Ke depan, Anies ingin mengetahui jumlah lahan pertanian untuk menghitung

jumlah pupuk yang harus disediakan.

"Jadi sebetulnya ini bukan sulit, tapi tidak dikerjakan dengan serius. Ini bukan sesuatu yang rumit, ini mau dikerjakan atau tidak mau dikerjakan. Insya Allah nanti kita kerjakan dengan serius," kata Anies.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, petani akan lebih sejahtera jika tata niaga pertanian bisa diperbaiki. Anies kembali menawarkan pertanian kontrak agar harga panen bisa lebih stabil dan petani tak merugi.

"Jangan sampai yang lemah makin lemah, insya Allah nanti yang lemah jadi kuat, dan bapak ibu semua insya Allah bisa menabung serta memiliki kesempatan lebih untuk lebih sejahtera," kata Anies mengesankan. ● mei

Ganjar: Bawaslu Mesti Tunjukkan Taring, Kalau Tidak, Tidak akan Dipercaya

BLORA (IM) - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum bertaji. Sebab menurut Ganjar, dari hari ke hari semakin banyak dugaan pelanggaran pemilu.

"Saya kira Bawaslu mesti bertaring, dan Bawaslu mesti menunjukkan taringnya," kata Ganjar setelah menemui para caleg, tim pemenangan daerah, dan relawan di Jetis, Blora, Jawa Tengah, Kamis (4/1).

"Kalau tidak, lembaga ini tidak akan dipercaya," kata Ganjar menambahkan.

Ganjar menyebut adanya potensi terjadi keriuhan jika sampai timbul ketidakpercayaan pada penegakan hukum karena penegak hukum tidak menjalankan fungsi dan wewenangnya.

"Semua akan mengambil tindakan (sendiri-sendiri) dan itu tidak bagus untuk sebuah proses demokrasi," katanya.

Ganjar menyoroti Sentra Penegakan Hukum Ter-

padu yang berwenang mengadili pidana pemilu, berisi keajaaksanaan, kepolisian, dan Bawaslu agar siaga dan bersikap tegas.

"Kalau kemudian kita disakiti, pasti kita akan melawan. Tapi kalau kemudian kita bikin gara-gara, ya kita harus minta maaf, dan kita bukan tidak bisa ditindak lho, kita juga bisa ditindak, maka ikuti aturan dan jangan bikin persoalan," ungkap politikus PDI-P itu. ● mei

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, dengan ini Para Pemegang Saham dan Pengurus PT EZMART ELECTRONIC COMMERCE INDONESIA berkedudukan di Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta (Perseoran) mengumumkan bahwa Perseoran berencana melakukan pengalihan saham-saham dalam Perseoran yang mana akan mengakibatkan perubahan pengendalian terhadap Perseoran dan juga perubahan klasifikasi saham-saham.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka setiap Pihak yang berkeberatan atas rencana pengalihan saham dapat mengajukan keberatannya kepada Perseoran pada alamat domisili Perseoran yakni Sahid Sudirman Centre lantai 49 Unit E, Jalan Sudirman Nomor 86, Kelurahan Karet Tenggis, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, disertai dengan bukti yang sah paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Pengumuman ini.

Jakarta, 05 Januari 2024
Tertanda
Para Pemegang Saham dan Pengurus Perseoran

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, dengan ini Para Pemegang Saham dan Pengurus PT TIAN XING CLOUD SUPPLY CHAIN INDONESIA berkedudukan di Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta (Perseoran) mengumumkan bahwa Perseoran berencana melakukan pengalihan saham-saham dalam Perseoran yang mana akan mengakibatkan perubahan pengendalian terhadap Perseoran dan juga perubahan klasifikasi saham-saham.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka setiap Pihak yang berkeberatan atas rencana pengalihan saham dapat mengajukan keberatannya kepada Perseoran pada alamat domisili Perseoran yakni Sahid Sudirman Centre lantai 49 Unit E, Jalan Sudirman Nomor 86, Kelurahan Karet Tenggis, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, disertai dengan bukti yang sah paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Pengumuman ini.

Jakarta, 05 Januari 2024
Tertanda
Para Pemegang Saham dan Pengurus Perseoran



GANJAR PRANOWO SERAP ASPIRASI PETANI BLORA

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kedua kanan) berdialog dengan petani di Blora, Jateng, Kamis (4/1). Dalam kunjungannya itu Ganjar mendengarkan aspirasi petani dan warga diantaranya tentang pupuk dan kendala pembayaran cicilan utang Kredit Usaha Rakyat dan pupuk.

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, maka dengan ini Direksi dan PT HAFARA SUKSES MAKMUR berkedudukan di Kota Balikpapan (selanjutnya disebut "Perseoran"), memberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tertanggal 28 Desember 2023, seluruh pemegang saham Perseoran pada pelaksanaannya Memutuskan hal-hal sebagai berikut: Pengurangan Modal Dasar Perseoran dari sebelumnya sebesar Rp.2.500.000.000,- menjadi sebesar Rp.500.000.000,-. Pengurangan Modal Ditempatkan dan Diserap Perseoran dari sebelumnya sebesar Rp.2.500.000.000,- menjadi sebesar Rp.125.000.000,- dan Pengalihan sebagian besar saham Perseoran kepada Pihak Ketiga; Bagi para pihak yang berkepentingan atau kreditor yang berkeberatan atas hal tersebut, dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya dan memberikan bukti pendukung yang lengkap, dalam jangka waktu 60 Hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, pada hari kerja ke alamat sebagai berikut:

PT HAFARA SUKSES MAKMUR
Jakarta, 4 Januari 2024
DIREKSI PT HAFARA SUKSES MAKMUR